

## Beberapa Catatan Singkat Tentang Masalah

### “Hari Jadi Polri dan Hari Kepolisian 1 Juli”

Oleh Drs. Hadi Saputro \*)

Masalah ini telah pernah didiskusikan atas prakarsa Bako Polri bersama Komisaris Jendral Polisi (P) Drs. Soeyoed Binwahyoe, S.H., M.Si. bertempat di Bako Polri Jakarta, kira-kira 2 tahun yang lalu. Penulis turut memberikan pendapat, yang pokok-pokoknya sama dengan uraian di bawah ini.

Timbulnya masalah ini karena :

1. Pemberitaan disementara media massa, yang meliputi upacara Perayaan Hari Kepolisian tanggal 1 Juli, sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) atau Hari Jadi Polri. Hal ini menimbulkan kesan pada sementara warga masyarakat, bahkan juga di kalangan sementara warga Polri, bahwa tanggal 1 Juli adalah kelahiran/hari jadi Polri.

Bahkan dalam terbitan resmi dari Mabes Polri berjudul “Sejarah Kepolisian di Indonesia” terbitan tahun 1999 pada halaman 63 terpampang foto upacara peringatan pertama 1 Juli (tahun 1947 di Yogya), dengan diberi penjelasan sebagai “Upacara HUT Kepolisian Negara RI”, sedangkan pada foto peringatan pada halaman 62, disebutkan sebagai “Upacara Hari Kepolisian R.I.”

2. Anggapan bahwa tanggal 1 Juli adalah Hari Jadi (Ulang Tahun) Polri mendapat tantangan, di antaranya yang datang dari Kom. Jen. Pol (P) M. Yasin,

yang mengklaim bahwa Hari jadi Polri adalah tanggal 21 Agustus, karena pada tanggal 21 Agustus 1945 ia selaku Pimpinan Polisi Istimewa Surabaya, mem-“proklamirkan” Polisi sebagai Polisi Republik Indonesia”.

3. Dalam silang pendapat tentang Hari jadi Polri, mantan Kapolri Jen. Pol.(P) Drs. Awaludin Djamin, M.P.A., Dr., berpendapat bahwa tanggal 1 Juli adalah Lahirnya Polisi Nasional Indonesia (National Indonesian Police).

Sedangkan sebenarnya lembaga Polisi yang tumbuh sejak Proklamasi Kemerdekaan adalah sudah bersifat nasional, karena sebagai lembaga dari Negara yang merdeka.

Dalam kenyataan : tidak pernah ada pernyataan (*statement*) dari seorang Pimpinan Polri (Kapolri), yang menyebut tanggal 1 Juli sebagai Hari Jadi/Lahirnya Polri. Setiap Peringatan Hari 1 Juli, selalu disebut sebagai Peringatan Hari Kepolisian atau Hari Bhayangkara, Pada Peringatan 1 Juli 1997, Kapolri Jen. Pol. Drs. Widodo Budhidarmo mencanangkan 1 Juli sebagai Hari Kamtibmas, dengan memberi arti pentingnya peringatan tersebut tidak hanya untuk Polri, akan tetapi juga untuk masyarakat. Dalam tahun 1976 diadakan Seminar Nasional tentang Kamtibmas dengan tema “Pergalakkan partisipasi masyarakat dalam binkamtibmas”, di mana penulis dalam jabatan Danjen

\*) Penulis adalah mantan Gubernur PTIK, Jakarta

Kobagdiklat menjadi Ketua *Steering Commitee*. Hasil seminar tersebut telah dibukukan. Dalam status MPP penulis ditarik sebagai Staf Pri Kapolri dan menjadi salah satu "speech writer" nya, antara lain pidato Hari Kepolisian 1997.

Kesimpulan:

1. Tanggal 1 Juli (1946), memang bukan menunjukkan hari lahirnya Polri.

2. Apabila demikian, maka:

a. Tanggal berapa bisa dianggap sebagai hari lahirnya Polri.

b. Apa arti signifikan dari tanggal 1 Juli 1946 sehingga perlu dipertahankan untuk diperingati setiap tahun oleh Polri.

#### A. Hari Lahirnya Polri

1. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.

a. Proloog : Perjuangan kemerdekaan bangsa pada zaman penjajahan Belanda. Perjuangan kemerdekaan pada zaman Pemerintah Militer Jepang melalui Badan Pusat Tenaga Rakyat (Putera) yang dipimpin Soekarno, Hatta dan Mansjur.

Jenderal Terauchi, pimpinan tertinggi militer di Asia Tenggara di Saigon, menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Pembentukan Badan Tjuo Sangiin, Panitia persiapan kemerdekaan. Pembentukan Kenkoku Gakuin (kenkoku kemerdekaan, Gakuin pendidikan/sekolah), menyiapkan tenaga pimpinan dalam bidang umum (somuka) dan hukum (sihoka), salah seorang pengajarnya ialah Mr. Djokosoetono yang dikemudian hari akan sangat berperan dalam pembangunan Polri. Penulis adalah salah satu dari 50 murid sihoka. Perjuangan pemuda, pelajar,

mahasiswa Ikka Dai Gakko (kedokteran) dan Kenkoku gakuin menuntut kemerdekaan.

b. Jepang menyerah (kapitulasi), tanggal 14 Agustus 1947. Mental stress di kalangan pejabat militer dan sipil Jepang, dan terjadi vacuum dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintah.

c. Atas desakan gerakan pemuda, Kemerdekaan Negara RI diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Atas dasar seluruh Rakyat yang memang mempunyai keinginan untuk merdeka (*the desire to be free*), dan meliputi seluruh wilayah ex-Hindia Belanda. Sebagai Negara dengan sendiri melekat padanya kekuasaan Negara (*Staats-machten*), yang meliputi Kuasa Legislatif, Judikatif, Pemerintah (*bertuur*) dan Polisi (teori Catur Praja dari Vollenhoven dalam Staatsrecht Overzee), yang juga dianut oleh Mr. Djoko Soetono, yang dalam waktu sesingkatnya akan diambil alih dari tangan Jepang (teks Proklamasi).

Panitia Persiapan Kemerdekaan yang dibentuk dalam era pemerintahan pendudukan Jepang, tetap difungsikan.

d. Pada upacara Proklamasi Kemerdekaan, dikibarkan Bendera Merah Putih, berarti mengangkat bendera Merah Putih sebagai bendera perjuangan, menjadi Bendera Negara, dan merupakan simbol yang bersifat fisik yang menandakan keterikatannya yang memakai, orang atau kelompok dan lingkungan pekerjaan sebagai bagian dari Negara yang dilambangkan.

2. Tanggapan masyarakat terhadap Proklamasi Kemerdekaan adalah

spontanitas untuk menyatakan dirinya menjadi warga atau bagian dari Negara Proklamasi dengan ungkapan fisik memakai lambang negara sebagai lencana pada pakaian atau kelengkapannya, menaikkan bendera Merah Putih pada lingkungan pekerjaannya, atau dengan ungkapan vokal dengan memekikkan salam Merdeka.

3. Reaksi Polisi (Jepang) diungkapkan oleh personil pribuminya. Selain ikut serta dalam pengamanan upacara Proklamasi, sejak siang dan sore hari tanggal 17 Agustus 1945 secara spontan sudah mulai mengganti lencana tutup kepala (*pet*) dengan lencana merah putih, meskipun bentuknya belum seragam, untuk menggantikan lencana Hinomaru Jepang. Hal ini terjadi di Jakarta, di mana sementara kader Polisi muda sudah melibatkan diri dalam gerakan kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945 sementara kantor Polisi Seksi di Jakarta sudah mulai menaikkan bendera merah putih di kantornya. Hal yang serupa juga berlangsung di kantor Polisi di Semarang (tanggal 18 Agustus), Surakarta (19 Agustus) dan pasti di kantor-kantor Polisi disebagian besar kota di Jawa.

Pada tanggal 19 Agustus 1945, pengamanan Pawai Raksasa di lapangan Ikada (Gambir) telah dilakukan oleh Polisi Jakarta yang sudah memakai lencana merah putih. Ternyata reaksi spontanitas menggunakan lambang merah putih ini juga terjadi di luar Jawa, meskipun agak terlambat karena keterlambatan berita tentang Proklamasi. Pada tanggal 19 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan

ditentukan tempat Polisi dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri dalam wadah yang berbentuk "Djawatan Kepolisian Negara", atas saran Bung Karno.

Pada tanggal 20 Agustus 1945 seorang anggota Polisi Surabaya, Nainggolan, menaikkan bendera Merah Putih, tetapi diturunkan oleh tentara Jepang. Pada tanggal 21 Agustus 1945, M. Yasin sebagai pimpinan Polisi Istimewa Surabaya, menyatakan Polisi dianggap lahir (yang ia pimpin sebagai) "Polisi Republik Indonesia"

4. Dapat disimpulkan, bahwa adanya Polisi RI (sebagai lembaga) lahir dan tumbuhnya dari bawah, perorangan ataupun satuan di lapangan yang mengambil alih kuasa Polisi dari penguasa Jepang, dan merupakan akar-akar (*grass-roots*) dalam tumbuhnya pemegang kuasa Polisi yang akan tertampung dalam wadah Djawatan Kepolisian Negara sebagai bentuk kelambangannya, yang kemudian dikenal dengan sebutan Polri. Polri terbentuk dari bawah (*bottom up*), bukan ditentukan dari atas (*top down*), dapat dikatakan bahwa Polri merupakan lembaga pertama yang terbentuk dalam Negara RI sehingga bersifat nasional. Tidak ada seorangpun atau satuan yang dapat mengklaim dirinya sebagai cikal bakal berdirinya Polri!

#### **B. Arti Signifikan dari Tanggal 1 Juli Bagi Polri.**

1. Dengan ketentuan Pemerintah No, 11/ S.D. tanggal 1 Juli 1946, Polri langsung ditempatkan di bawah Perdana Menteri. Dengan ini maka berakhirilah status Polisi yang salah di bawah sub ordinasi lembaga lain.

Latar belakang historisnya:

a. Pada zaman kolonialisme Belanda, pengelolaan administratif (*administratief beheer*) Polisi ada ditangan Departemen Dalam Negeri, dan Pengendalian justitieel ada ditangan Jaksa Agung. Di tingkat Pemerintahan daerah, Gubernur memegang kebijaksanaan polisionil (*politiek politieel beleid*), sedangkan Residen memegang pimpinan Polisi. Pengendalian justitieel dilakukan oleh Jaksa Agung melalui dinas pusat reserse kriminilnya, langsung pada Residen sebagai pimpinan polisi setempat (karesidenan). Tugas justisionil / kriminal sehari-hari polisi ditempatkan sebagai pembantu jaksa (*hulp magistrat*) dari jaksa setempat. Hubungan sub ordinatif antara Polisi, Bestuur dan Jaksa diletakkan dalam *Herzine Inlands Reglement* (HIR) tahun. 1941.

b. Pada Zaman pendudukan/pemerintahan militer Jepang, kuasa tertinggi ada di tangan Pimpinan militer tertinggi *Seiko Sisikan*. Pemerintahan aspek sipilnya dilakukan oleh *Gunseikan*, yang bersifat umum oleh bagian *Sumoka*, dan bidang keamanan oleh *Chianbu*, di mana Polisi dan Jaksa dibawakan di bawah satu tangan pimpinan. Susunan pemerintahan tingkat daerah dilakukan mengikuti pola pemerintah Hindia Belanda dengan jenjang jabatan Gubernur, Residen, Bupati, Wedana dan Camat. Meskipun Polisi menjadi bagian dari Chiangbu, namun pimpinan pemerintahan daerah tetap menduduki sebagai pimpinan polisi.

c. Nampak kedudukan Polisi yang selalu membawah pada instansi lain. Dan keadaan ini tidak berubah setelah

Proklamasi kemerdekaan, di mana Polisi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan ditempatkan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan membawah kepada Pimpinan pemerintah daerah. Trauma sub-ordinatif ini dialami dan membayangi para pejabat Polisi.

-Polisi dianggap lahir cacat.  
d. R.S. Soekanto diangkat secara resmi sebagai kepala Polisi Negara pada tanggal 29 September 1945. Beliau adalah salah seorang pribumi dari lulusan Kursus Komisariss jaman kolonial Belanda. Sebelum memasuki pendidikan Polisi, beliau telah mencapai tingkatan Kandidat I pada Sekolah Tinggi Hukum (*Rechts Hochschule/RHS* di Jakarta) setelah Proklamasi beliau menjabat sebagai Pimpinan Sekolah Polisi Sukabumi, dan banyak membantu gerak pemuda dalam melanjutkan perjuangan kemerdekaan dengan mengirim sejumlah senjata api yang diangkut oleh salah seorang pembantunya, Toty Soebianto, dengan kendaraan truk ke Jakarta. Karenanya terjadi hubungan antara beliau dengan pimpinan gerakan pemuda Chaerul Saleh, yang menawarkan kepada beliau untuk bersedia dicalonkan sebagai Kepala Polisi Negara, dengan adanya hubungan ini, praktis beliau dianggap sebagai pimpinan kepolisian, yang kemudian dengan resmi dikokohkan sebagai Kepala Polisi Negara pada tanggal 29 eptember 1945. Sebagai Kepala Kepolisian Negara dalam lingkungan kementerian Dalam Negeri, beliau mengadakan hubungan yang intens dengan Mr. Djokosoetono dan seorang pejabat tinggi Mendagri, Mr. Soemarwan, yang kemungkinan sudah dikenalnya sewaktu bersama-sama menjadi student pada RHS. Nampaknya kedua tokoh

tersebut mengikuti faham Catur Praja dari gurunya Vollenhoven, yang memandang polisi sebagai kuasa negara di samping kuasa legislatif, yudikatif dan *Bestuur*, karenanya kuasa ke-4 (*polisi-macht*) patut pelaksanaannya di lembagakan sebagai instansi Polisi yang berdiri sendiri di samping aparatur pemerintahan lainnya.

Perjuangan Kepala Kepolisian Negara Soekanto dengan dukungan Mr. Djokosoetono untuk melepaskan Polisi dari hubungan sub ordinatif dari *Bestuur*, dan dengan adanya hubungan yang baik antara Kepala Kepolisian Negara dengan Perdana Menteri Soetan Sjahrir, menghasilkan keputusan pemerintah untuk menempatkan Polisi langsung di bawah Perdana Menteri pada tanggal 1 Juli 1946. Untuk menyiapkan kader-kader Polisi sebagai calon pimpinan Polisi di kemudian hari, dirancang adanya pendidikan tinggi bagi kader berkualitas akademis, mirip dengan *Kenkoku Gakuin* pada zaman pendudukan Jepang yang lampau. Hal ini terlaksana dengan dibentuknya dan diresmikannya Sekolah Polisi Bagian Tinggi/Polisi Akademi pada tanggal 17 Juni 1946. Penulis memasuki pendidikan tersebut sebagai siswa angkatan ke II pada bulan Februari 1947. Dengan keputusan 1 Juli 1946, Polisi menjadi lembaga yang berdiri sendiri, atau bersifat mandiri meskipun masih secara struktural kelembagaan, karena beberapa peran *Bestuur* dan Kejaksaan terhadap Polisi masih dipertahankan berdasar Keputusan Bersama antara Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman tertanggal 14 Februari 1947.

Dengan adanya keputusan 1 Juli 1946,

Polri mendapatkan identitasnya/jati dirinya yang pertama, ialah sebagai lembaga yang berdiri sendiri. Hal ini adalah hasil perjuangan Kepala Kepolisian Negara R.S. Soekanto beserta kader-kader Polisi pembantunya, dengan dukungan tokoh intelektual Mr. Djokosoetono.

2. Dengan terbentuknya Negara Federal Republik Indonesia Serikat (RIS.) pada tahun 1950, Polisi mengalami *set-back* dengan dikembalikan kedudukannya di bawah Menteri Dalam Negeri. Republik Indonesia Serikat dilikuidasi pada tanggal 17 Agustus 1951, dan terbentuk kembali Negara Kesatuan RI.

Dan dengan keputusan Dewan Menteri tanggal 2 Nopember 1952, status Polisi dikembalikan berada di bawah Perdana Menteri. Namun Menteri Kehakiman Mr. Djodi Gondikoesoemo melontarkan gagasan dan memperjuangkannya untuk membawa Polisi dalam lingkungan kehakiman. Hal ini mendapat tantangan keras dari Polisi melalui organisasi persatuan pegawai Polisi RI (P3RI), dan tantangan ini dicetuskan dalam kongres di Solo pada tahun 1955 dan Rapat Pengurus Besar P3RI di Salatiga tahun itu juga, yang merumuskan sikap yang akan diambil warga P3RI apabila Polisi dimasukkan dalam Kementrian Kehakiman. Rumusan sikap yang tertulis dimaksudkan amlop dan di lak, dan akan dibuka dan rumusan sikap ini akan dilaksanakan apabila sampai hal tersebut terjadi. (Pada Kongres P3RI dan Rapat Pengurus Besar tersebut penulis hadir sebagai perwakilan daerah Nusa Tenggara). Dengan penolakan Polisi/P3RI tersebut Menteri Kehakiman

mengalami pasang surut. Dalam era Reformasi membentuk masyarakat yang madani dengan tata kehidupan yang demokrasi, setelah pelepasannya dari ABRI, Polri memerlukan paradigma yang baru serta menentukan visinya dalam perkembangan sosial yang sedang berlaku. Salah satu langkahnya ialah merubah sebutan Hari Kepolisian atau Hari Bhayangkara, dengan istilah yang mencerminkan paradigma dan visinya tersebut. Dan karena itu setiap tahun tanggal 1 Juli harus tetap diperingati.

3. Proklamasi M.Jasin atas nama warga (Polisi di Surabaya) pada tanggal 21 Agustus 1945, bisa dipandang sebagai rangkaian pengambilan kuasa dari tangan Jepang, yang terjadi pada setiap satuan Polisi di Indonesia pada waktu yang saling berbeda, dan sudah dilakukan di Jakarta sejak tanggal 17 Agustus 1945 (setelah Proklamasi). Tetapi harus diakui, bahwa M.Jasin yang pertama-tama menggunakan istilah Polisi Republik Indonesia.

Catatan :

Untuk lebih memahami kajian saya terhadap Hari Jadi Polri secara ilmiah (Sejarah Polisi adalah salah satu aspek dari ilmu kepolisian), maka secara singkat landasan-landasan yang dipakai adalah pendekatan interdisipliner :

**1. Semantik**, arti kelahiran (hari jadi), ialah sesuatu yang ada, yang sebelumnya tidak/belum ada melalui suatu proses sebelum kelahiran, proses pada waktu lahir dan proses pertumbuhan kemudian. Jadi menyangkut lahirnya Polri, yang sebelum proklamasi belum ada tetapi adanya Polisi di Jepang.

**2. Paradigma**, untuk kelahiran Polri yang

dipakai adalah isi dan jiwa yang terkandung dalam upacara pembacaan teks proklamasi, ialah :

1) Kemerdekaan Indonesia, semangat kemerdekaan.

2) Pengambil alihan kekuasaan negara (negara).

3) Penggunaan Merah Putih sebagai simbol negara.

### **3. Pendekatan Disiplin Ilmu yang dipakai**

#### **1) Hukum Negara : (*Staatsrecht*)**

a. Adanya kuasa negara (power of the state) yang melekat pada setiap negara. Dalam kasus Indonesia mengikuti teori Catur Praja (Vollenhoven/Djokosoetono): kuasa legislatif, yudikatif, *bestuur*, dan polisi.

b. Pembentukan institusi-institusi negara untuk menyanggah dan menjalankan pelimpahan kuasa tersebut, di antaranya institusi polisi yang menyanggah kuasa polisi.

#### **2) Sosiologi**

a. Tumbuh mengakar dari bawah (*grass root*) yang mengarah pembentukan sesuatu.

b. Hal yang nyata-nyata berlaku akan mempunyai kekuatan normatif (*der normativen Kraft der Faktisen*).

c. Efek demonstratif dari sesuatu fakta / kejadian.

#### **3) Sejarah**

Keseluruhan fakta-fakta (*emperi*), baik berdiri sendiri maupun saling berkaitan, yang mengandung suatu makna yang sama, berlaku dalam kurun waktu, yang menghasilkan kebenaran sejarah. Kebenaran-kebenaran sejarah

akan menciptakan teori sejarah (misalnya teori lahirnya lembaga polisi).

#### 4) Komunikasi

Terutama sarana yang dipakai untuk menyampaikan suatu kehendak untuk diterima, antara lain :

- verbal dengan kata-kata (proklamasi).
- dengan memakai simbol/tanda-tanda
- dengan sikap (penampilan diri)
- dengan tindakan



### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

Jalan Diponegoro No. Sungailiat ( 33215 ) Telp. 92412

#### MENGUCAPKAN :

SELAMAT KEPADA BAPAK INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs.S.SUPARTO  
SEBAGAI KAPOLDA SUMATERA SELATAN

dan

SELAMAT ATAS ALIH TUGAS YANG BARU KEPADA  
BAPAK INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs.SJAHROEDIN ZP  
SEBAGAI KAPOLDA JAWA BARAT

### PT INDRRA KARYA

BRANCH OFFICE I

INKINDO NO. 3071P/272 JTM

CONSULTING ENGINEERS



|                        |  |
|------------------------|--|
| Head Office Jakarta    | Jl. Biru Laut 10 Kev 9 Telp. (021) 6182030, 0197155, Fax. 0192179 TELEX 48338 JKA PRT IA |
| Branch Office I Malang | Jl. Surabaya No. 3A Telp. (0341) 551311, 552773, 599205, Fax. 551403                     |
| Branch Office Mataram  | Jl. Angsoka 15 Mataram Telp. (0370) 626401 Fax. (0370) 626401                            |
| Branch Office Kupang   | Jl. Sam Ritelangi II / 35 Wallkota Baru - Kupang, Telp. (0380) 838008 Fax. (0380) 838008 |
| Branch Office Bali     | Jl. Tunjung II No. 20A Denpasar - Bali, Telp. (0361) 224968 Fax. (0361) 224968           |



### PT. (PERSERO) ASURANSI JIWasRAYA

Jl. Letjen Suparman No. 20  
Telp. (0354) 689270, 687969, 688496 KEDIRI